

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1. Konsep Akuntabilitas

Beberapa definisi akuntabilitas yang dikemukakan oleh peneliti. Akuntabilitas pada pemahaman Gray et al (2006) di dalam Randa (2011) didefinisikan sebagai hak masyarakat yang timbul karena adanya hubungan antara organisasi dan masyarakat. Pengertian ini memberikan pandangan yang luas bahwa akuntabilitas bukan hanya milik individu atau organisasi tetapi menjadi hak dan milik masyarakat umum yang mempunyai kedekatan atau keterpautan dengan individu atau organisasi tersebut. Lebih lanjut Gray et al(1997 & 1998) di dalam Randa (2011) menyatakan konsep akuntabilitas ini berada dalam kerangka tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi sebagai bagian dari komunitas masyarakat luas.

Pandangan Sinclair (1995) dan Gray (1997,1998, & 2006) di dalam Randa (2011) menunjukkan akuntabilitas harus disiapkan oleh subjek yang melakukan suatu aktivitas kepada publik agar individu atau organisasi mendapat kepercayaan publik atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan organisasi yang bersangkutan.

2.1.1. Akuntabilitas dalam Ilmu Pengetahuan

Akuntabilitas merupakan salah satu karakteristik yang diperankan oleh organisasi sektor publik. Mardiasmo (2009:8) di dalam Koe (2017) menjelaskan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak

pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Bastian (2010) di dalam Kaomaneng (2012) memaknai akuntabilitas sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Berbagai definisi mengenai akuntabilitas dijelaskan oleh beberapa peneliti. Bastian (2007) di dalam Kaomaneng (2012) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan entitas sebagai suatu kesatuan dari unit-unitnya serta penafsiran atas hasil-hasil dari aktivitas yang dilakukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu sistem informasi berupa laporan keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak baik pihak internal maupun pihak eksternal organisasi.

Pemikiran akuntabilitas tidak hanya penting secara moral dan teoritis namun juga secara praktik. Perjanjian akan disepakati oleh pihak lain jika agen bertindak sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, akuntabilitas sebagai suatu konsep ilmu pengetahuan membutuhkan praktik yang nyata.

Menurut Mahmudi (2015) di dalam Saputri (2020) akuntabilitas terdiri atas dua macam, yakni: akuntabilitas Vertikal (*Vertikal Accountability*) dan akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*). Akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas berupa pertanggungjawaban yang dilakukan kepada

otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal merupakan akuntabilitas berupa pertanggungjawaban yang dilakukan kepada masyarakat atau lembaga yang setara. Sedangkan akuntabilitas menurut Pujiningsih (2013) di dalam Koe (2017) adalah mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada pemberi amanah atau yang mendelegasikan kewenangan memuaskan terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan. Jadi akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban manajemen (*agent*) atau pihak yang memperoleh kepercayaan untuk mengelola sumber daya kepada publik (*principal*) atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Sedarmayanti (2015) di dalam Koe (2017) mengatakan pelaksanaan akuntabilitas perlu memperhatikan asas-asas dalam akuntabilitas, yaitu:

- a. komitmen pimpinan dalam melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel
- b. menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan
- c. berorientasi pada pencapaian misi dan visi dan hasil manfaat yang diperoleh
- d. jujur, objektif, transparan, dan inovatif.

Dari asas-asas tersebut dapat disimpulkan bahwa asas akuntabilitas merupakan asas pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh pemegang keputusan sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*.

Adanya asas dalam akuntabilitas maka terdapat manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan akuntabilitas, yaitu:

- a. Terbuka dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi
- b. Mendorong terciptanya transparansi dan *responsiveness* organisasi
- c. Mendorong partisipasi masyarakat
- d. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan ekonomis terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan

ekonomis terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

- f. Mendorong pengembangan system penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.
- g. Mendorong terciptanya iklim kinerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin.
- h. Mendorong kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Identifikasi kepentingan *stakeholder* merupakan elemen kunci dalam akuntabilitas Unerman (2006) & Ebrahim (2013) di dalam Randa (2015). Akuntabilitas merupakan informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan individu atau organisasi. Secara teoritis, seluruh *stakeholder* yang terlibat dan terkena dampak kegiatan memiliki hak atas tanggungjawab aktivitas organisasi

2.1.2. Akuntabilitas dalam Perspektif Alkitabiah

Pemimpin gereja dalam hal keuangan gereja diharapkan memiliki integritas yang tinggi, seperti tidak mencuri uang, tidak menipu orang untuk mendapatkan uang, tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun untuk memperoleh uang, dan tidak mau menerima suap. Pemimpin gereja diharuskan menjaga tangannya agar tetap bersih dalam hal keuangan dan bersedia setiap saat untuk diaudit dari awal sampai akhir pelayanannya. Nabi Samuel dalam 1 Samuel 12:3-5 menegaskan perilaku pemimpin gereja yang benar dalam hal pengelolaan keuangan gereja;(3) Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan TUHAN dan di hadapan orang yang diurapi-Nya; Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu.”(4) jawab mereka: “Engkau tidak memeras kami

dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun.” (5) Lalu berkatalah ia kepada mereka: “TUHAN menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapi-Nya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku.” Jawab mereka:”Dia menjadi saksi.”

Berdasarkan kedua ayat tersebut, bendahara gereja diajarkan untuk melakukan kebenaran dalam hal pengelolaan keuangan. Bendahara juga dituntut untuk mengolah keuangan gereja dengan kebenaran atau tidak melakukan kecurangan, penggelapan, dan penyalahgunaan uang gereja. Yesus dalam khotbahNya yang ditulis oleh Rasul Markus dalam Markus 13:34 mengatakan “Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba- hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga.” Dalam Markus 13:34, yesus memerintahkan untuk setiap orang yang menerima kepercayaan untuk melakukan setiap tugas yang diterimanya dengan penuh tanggung jawab, apabila tuannya atau pimpinannya datang untuk menilai kinerjanya orang tersebut telah siap. Bendahara gereja yang diberi kepercayaan untuk mengelola keuangan gereja juga harus melakukan setiap pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab.

2.1.3. Akuntabilitas dalam Organisasi Gereja

Penelitian akuntansi dan akuntabilitas dalam organisasi gereja telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti: Laughlin (1998 &1990) di dalam Randa (2015) mencoba memahami praktik akuntansi dan akuntabilitas dalam organisasi gereja di Inggris dengan menggunakan pendekatan struktural. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat praktik akuntabilitas yang memadai

antara jemaat, pemimpin gereja (imam), dewan gereja, dan anggota kongregasi yang bernaung di bawah gereja. Berbeda dengan penelitian Booth (1993) di dalam Randa (2015) yang lebih mendalami praktik akuntansi pada tataran pemaknaan kata-kata “suci” dan “kudus” dalam pengelolaan keuangan gereja. Booth (1993) di dalam Randa (2015) merumuskan tiga unsur utama yang mempengaruhi penerapan akuntansi dan akuntabilitas dalam gereja. Pertama, organisasi gereja didominasi oleh doktrin suci dan konsep teologi yang berbeda-beda pada masing-masing aliran gereja, sehingga ada resistensi terhadap penggunaan akuntansi dalam gereja. Kedua, resistensi dilakukan oleh para pemimpin gereja karena akuntansi dianggap sebagai media komunikasi yang dapat mengungkap kondisi riil apa yang ada dalam organisasi gereja.

Penelitian lain dilakukan Duncan et al. (1999) di dalam Randa (2015) yang meneliti sistem pengendalian internal gereja dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Mereka menemukan bahwa dengan semakin banyak jumlah jemaat, maka pembagian tugas dapat dilakukan dengan baik sehingga dapat menghasilkan pengendalian internal yang lebih memadai dibanding dengan gereja kecil. Sebagai penelitian Lightbody (2001) di dalam Randa (2015) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi menemukan bahwa akuntan meskipun dilibatkan dalam penyusunan anggaran dan penyajian informasi keuangan organisasi gereja, namun tidak dapat menjalankan tugas dengan baik karena adanya dominasi pimpinan gereja. Hal itu sejalan dengan penelitian Booth (1993) yang menemukan tingginya kekuasaan pemimpin dalam organisasi gereja.

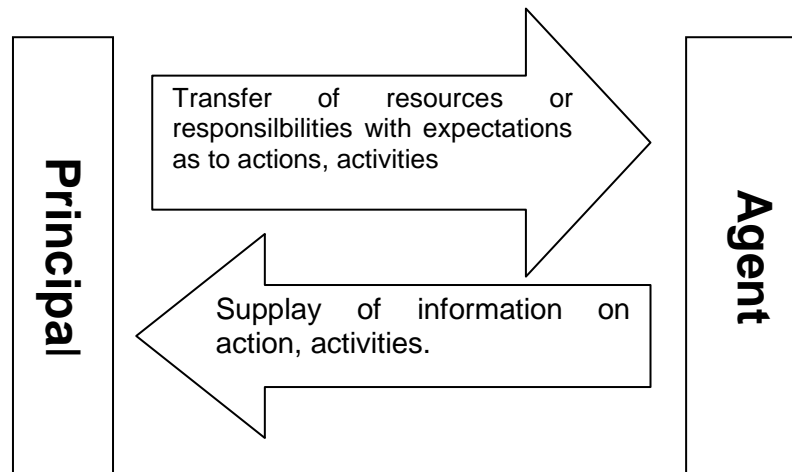
Penelitian secara khusus tentang akuntabilitas spiritual dalam gereja khususnya dalam gereja protestan dilakukan oleh Jacob dan Walker (2000) di dalam Randa (2015) yang meneliti praktik akuntabilitas di lingkungan gereja

komunitas IONA dan Saerang (2001) di dalam Randa (2015) yang meneliti komunitas gereja pentakosta di Indonesia. Penelitian Jacobs dan Walker (2000) di dalam Randa (2015) menemukan kegiatan keseharian komunitas IONA ditentukan oleh aturan kristiani. Kegiatan sehari-hari organisasi gereja seperti penerimaan dan penggunaan dana sumbangan dan operasional dicatat dan setiap anggota berhak meminta penjelasan atas akun-akun tersebut. Sedangkan penelitian Saerang (2001) di dalam Randa (2015) menemukan bahwa akuntabilitas dalam gereja pentakosta beragam dari umat yang bersifat komunal tidak perlu menggunakan sistem informasi akuntansi karena sangat sederhana seperti dana persembahan dan sumbangan. Sedangkan untuk level organisasi gereja sangat diperlukan seperti dewan gereja pada tingkat pusat dan regional. Akuntabilitas dari kedua hasil riset ini merupakan bentuk refleksi spiritual antara agama dan pembukuan yang tidak dapat dipisahkan. Kegiatan ini didasari filosofi yang menyatakan hubungan antara Tuhan dan manusia merupakan hubungan pribadi yang dipraktikkan dalam bentuk akuntabilitas yang meliputi aspek spiritual, sosial dan keuangan oleh para anggota jemaat dan pimpinan gereja lewat perilaku mereka setiap hari.

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam organisasi gereja lebih banyak ditentukan oleh para pemimpin gereja yang cenderung untuk menolak praktik akuntabilitas (Booth (1993) dan Lightbody (2001) di dalam Randa (2015)). Pada sisi lain organisasi gereja memiliki praktik-praktik yang telah lama dijalankan sehingga sulit untuk menerima perubahan secara langsung Berry (2005). Penelitian-penelitian tersebut juga sebagian besar dilakukan pada organisasi gereja protestan yang mempunyai karakteristik pada otoritas masing-masing gereja lokal dalam mengelola organisasi.

2.2. Model Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas tersebut dapat digunakan untuk membangun model akuntabilitas dalam menganalisis dan memahami akuntabilitas secara mendalam. Model akuntabilitas ini didasari oleh teori agensi bahwa terdapat dua pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi yaitu pihak prinsipal dan pihak agen. Model akuntabilitas ini kemudian dibangun oleh Gray & Saerang (2007) di dalam Randa (2015) yang menunjukkan ada dua arah hubungan di antara dua bagian *accountee* atau prinsipal dengan *accounter* atau agen.



Sumber: Gray(1996;39) dalam Randa (2011:69)

Gambar1. Model of Accountability

2.3. Prinsip dan Dimensi Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2000), prinsip-prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan

sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Menurut Mahmudi (2013) terdapat lima dimensi akuntabilitas, yaitu:

- a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (Accountability for Probity and Legality). Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.
- b. Akuntabilitas Manajerial (Managerial Accountability). Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (Performance Accountability). Efisien organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau costumernya.
- c. Akuntabilitas Program (Program Accountability). Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya

yang minimal. Lembaga-lembaga public harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

- d. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*). Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) dan kebijakan tersebut.
- e. Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*). Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*money public*) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik.

2.4. Jenis-jenis Akuntabilitas

Menurut Mahmudi (2013) di dalam Muchlisin (2020), akuntabilitas terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*). Akuntabilitas vertikal adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, kepala cabang kepada CEO, dan sebagainya.
- b. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*). Akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan.

Menurut Wasitiono (2007) di dalam Muchlisin (2020) berdasarkan perspektifnya akuntabilitas dibagi menjadi lima jenis, yaitu:

- a. Akuntabilitas Administratif/organisasi. Pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hierarki yang jelas.
- b. Akuntabilitas Legal. Akuntabilitas jenis ini merujuk pada dominan publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan oleh insitusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Akuntabilitas Politik. Dalam tipe ini terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber dan menjamin adanya kepatuhan

melaksanakan tanggungjawab administrasi dan legal. Akuntabilitas ini memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik.

- d. Akuntabilitas Profesional. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan.
- e. Akuntabilitas Moral. Akuntabilitas ini berkaitan dengan tata nilai yang berlaku dikalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat.

2.5. Laporan Keuangan Berdasarkan ISAK 35 Tentang Entitas Berorientasi Nirlaba

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) melalui Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nirlaba menerangkan bahwa laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi :

1. Laporan Posisi Keuangan

Tujuan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, liabilitas, dan ekuitas, serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu anggota organisasi dan pihak-pihak lain untuk menilai:

- a. Kemampuan organisasi untuk memberikan pelayanan secara

berkesinambungan;

- b. Fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban atau komitmennya, dan kebutuhan pendanaan.

Laporan posisi keuangan mencakup organisasi secara keseluruhan dan harus menyajikan tiga elemen penting yaitu, aset, liabilitas, dan ekuitas. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaatnya di masa depan bagi penyelenggaraan kegiatan organisasi.
- b. Liabilitas adalah utang masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya organisasi.
- c. Ekuitas adalah hak residual atas aktiva organisasi setelah dikurangi semua kewajiban.

2. Laporan Penghasilan Komprehensif

Penggunaan istilah "Penghasilan Komprehensif" untuk menunjukkan jumlah surplus (defisit) dan penghasilan komprehensif lain. Entitas dapat menggunakan judul lain sepanjang penggunaan judul lain mampu mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangannya.

3. Laporan Perubahan Aset Neto Entitas

Menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya (Misalnya jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).

4. Laporan Arus Kas

Tujuan umum laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan ini digunakan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menggunakan kastersebut. Penilaian penerimaan dan pengeluaran kas didasari atas tiga macam aktivitas, yaitu:(1) Aktivitas Operasional; (2) Aktivitas Investasi; (3) Aktivitas Pendanaan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Merupakan bagian dari laporan keuangan yang tak terpisahkan karena berisikan penjelasan-penjelasan rinci atas akun-akun dalam laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan dapat berupa :

- a. Perincian dari suatu perkiraan yang disajikan, misalnya aktiva tetap;
- b. Kebijakan akuntansi yang dilakukan, misalnya metode penyusutan serta tarif yang digunakan untuk aktiva tetap lembaga, metode pencatatan piutang yang tidak dapat ditagih serta presentasi yang digunakan untuk pencadangannya.

2.6 Tujuan Pembuatan Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nirlaba

Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembalikepadaanggota, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya,serta untuk mengatur pelaporan keuangan sehingga diharapkan laporan keuangan yang disajikan oleh entitas berorientasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi, di samping itu untuk menunjukkan akuntabilitas organisasi terhadap sumber daya yang dikelola dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai bagaiman sumber-sumber persembahandan penggunaan sumber daya keuangan;

- b. Menyediakan informasi mengenai bagaimana organisasi gereja mendanai aktivitas pelayanannya;
- c. Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu organisasi gereja dan perubahan di dalamnya;
- d. Menyediakan informasi menyeluruh yang berguna dan mengevaluasi kinerja organisasi gereja dari segi biaya, efisiensi dan pencapaian tujuan.

Laporan keuangan organisasi gereja juga memainkan peranan prediktif dan prospektif yang menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi banyaknya sumber daya yang diisyaratkan untuk aktivitas berkelanjutan, sumber daya yang dapat dihasilkan oleh aktivitas berkelanjutan, dan resiko serta ketidakpastian. Laporan keuangan dapat juga menyediakan informasi kepada pemakainya, seperti:

- a. Mengindikasikan apakah sumber daya telah digunakan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan; dan
- b. Mengindikasikan apakah sumber daya telah digunakan sesuai persyaratan, termasuk batas-batas keuangan yang ditetapkan.

Sebagaimana dibahasakan Mardiasmo (2009) di dalam Dinanti (2017) menyatakan tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba sebagai berikut :

- a. Laporan keuangan organisasi nirlaba hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi.
- b. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya

dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nirlaba serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut.

- c. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi nirlaba atas pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.
- d. Memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut.
- e. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan/kondisi sumber kekayaan bersih organisasi nirlaba serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja.
- f. Memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi.
- g. Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.

2.7. Sistem Pengelolaan Keuangan Gereja dengan Akuntansi

Akuntansi pada dasarnya adalah merupakan kegiatan yang mengolah transaksi-transaksi keuangan menjadi informasi keuangan yang siap pakai.

Kegiatan yang dilakukan dalam proses akuntansi meliputi: 1) pencatatan, 2) penggolongan, 3) peringkasan, 4) pelaporan dan 5) penganalisisan data keuangan dari suatu organisasi. Proses akuntansi tersebut akan menghasilkan informasi keuangan yang berguna baik bagi pihak internal organisasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keuangan maupun eksternal organisasi dalam menilai, mengevaluasi, menganalisis dan memonitoring.

Siklus akuntansi merupakan proses akuntansi mulai dari pencatatan transaksi keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan pada akhir periode. Pada dasarnya siklus akuntansi dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Membuat atau menerima bukti pencatatan dimana biasanya sebuah entitas mempunyai form voucher (bukti pencatatan) sendiri, bukti lain yang bisa berupa kwitansi atau lainnya.
- b. Mencatat dalam buku jurnal
- c. Memindahkan data jurnal ke buku besar
- d. Menyusun laporan keuangan.

2.8 Definisi Entitas Berorientasi Nirlaba

Entitas berorientasi nirlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan sumber daya yang diberikan. Sementara, Widhyartoh (2018) di dalam Koe (2017) menyatakan bahwa organisasi nirlaba didirikan bukan untuk mencari laba semata walaupun dalam perjalanannya membutuhkan dana.

Definisi entitas berorientasi nirlaba yang lain yaitu adalah suatu unit atau organisasi yang menggunakan dana masyarakat, seperti: Organisasi Pemerintah Pusat, Organisasi Pemerintah Daerah, Organisasi Partai Politik dan Lembaga

Swadaya Masyarakat, Organisasi Yayasan, Organisasi Pendidikan dan Kesehatan (puskesmas, rumah sakit, dan sekolah), Organisasi Tempat Peribadatan(masjid, gereja, vihara, kuil).

Entitas berorientasi nirlaba sebagai entitas yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal bersifat mencari laba ISAK 35 yang mengatur mengenai pelaporan keuangan entitas berorientasi nirlaba menjelaskan mengenai karakteristik entitas nirlaba yaitu sebagai berikut:

- a. sumber daya entitas berorientasi nirlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
- b. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan menumpuk laba, dan jika entitas berorientasi nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut
- c. Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas berorientasi nirlaba tidak dapat dijual, diahlikan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut

Nordiawan 2006 menambahkan karakteristik umum sebuah organisasi nirlaba adalah sebagai berikut: (1) dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial. (2) dimiliki secara kolektif oleh publik. (3) kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan.(4) keputusan-keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi didasarkan pada konsensus.

Berdasarkan karakteristik tersebut maka dapat di tarik suatu kesimpulan mengenai perbedaan antara entitas berorientasi nirlaba dengan entitas bisnis berorientasi laba, sehingga dapat lebih memperjelas tentang batasan pemisahan antara entitas berorientasi nirlaba dengan entitas bisnis berorientasi laba.

2.9. Metode Pencatatan Pendapatan dan Biaya dalam Laporan Organisasi

Nirlaba

Salah satu hal yang penting dalam proses pencatatan adalah masalah pengakuan. Secara sederhana pengakuan adalah penentuan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk menentukan hal tersebut digunakan berbagai basis/dasar akuntansi atau sistem pencatatan. Basis yang digunakan dalam pencatatan organisasi nirlaba yaitu:

1. Basis Kas (*Cash Basic*)

Basis kas merupakan basis akuntansi yang paling sederhana. Menurut basis ini, transaksi diakui/dicatat apabila menimbulkan perubahan atau berakibat pada kas, yaitu menaikkan atau menurunkan kas. Apabila suatu transaksi ekonomi tidak berpengaruh pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat. Kelebihan akuntansi berbasis kas adalah laporan keuangan berbasis kas memperlihatkan sumber dana, alokasi dan penggunaan sumber-sumber kas, mudah untuk dimengerti dan dijelaskan, pembuat laporan keuangan tidak membutuhkan pengetahuan yang mendetail tentang akuntansi, dan tidak memerlukan pertimbangan ketika menentukan jumlah arus kas dalam suatu periode.

Sementara itu keterbatasan basis kas adalah hanya memfokuskan pada arus kas dalam periode pelaporan berjalan, dan mengabaikan arus sumber daya lain yang mungkin berpengaruh pada kemampuan organisasi gereja

untuk melakukan pelayanan saat sekarang dan saat mendatang. Basis kas menyediakan informasi mengenai sumber dana yang dihasilkan selama satu periode, penggunaan dana dan saldo kas pada tanggal pelaporan. Model pelaporan keuangan dalam basis kas berbentuk Laporan Penerimaan Persembahan dan Pembayaran (*Statement Of Receipts and Payment*) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (*Notes To Financial Statement*). Basis pencatatan ini diterapkan pada pelaporan keuangan Jemaat, yang belum memungkinkan untuk melakukan pengembangan pelaporan keuangan.

2. Metode Basis Akrua

Bastian (2007b:80) di dalam Koe (2017) menyatakan bahwa basis akrua (*accrual basis*) adalah teknik pencatatan yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Cara pembukuan *accrual basis* membukukan pendapatan pada saat timbulnya hak tanpa memperhatikan kapan penerimaan terjadi, sudah diterima ataupun belum, serta membukukan pembelanjaan pada saat liabilitas terjadi tanpa memperhatikan kapan pembayaran dilaksanakan, sudah atau belum. *Accrual Basis* akan mencakup pencatatan terhadap transaksi yang terjadi di masa lalu dan berbagai hak dan liabilitas di masa yang akan datang. *Accrual basis* akan mempunyai atau meliputi semua aktivitas dibandingkan dengan *cash basis*.